

**PERAN ASEAN PLUS THREE MELALUI KOMITMEN ASEAN PLUS THREE  
EMERGENCY RICE RESERVE (APTERR) DALAM PENANGANAN ISU  
KETAHANAN PANGAN DI ASIA TENGGARA**

Dewi Astuti Mudji<sup>1</sup> Cindelas Prameswari Ramadhani<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*The region of ASEAN is the leading producer of rice in the world. For most people in ASEAN member countries, rice is also a staple food commodity. ASEAN is disaster prone areas such as tsunami, landslide, earthquakes, floods and hurricanes causing degraded farmland, swallowing casualties as well as farm animals. The research having problem formulation, how the role of ASEAN Plus Three through the APTERR program, how the dynamics of food security issue. and how to implement APTERR's commitment as an effort to address food security issues in southeast Asia. The purpose of this research is to know the cooperation of ASEAN Plus Three through APTERR program. The Data obtained will be analyzed by descriptive method of analysis. .Based on the analysis of the data done, the conclusion that ASEAN is also a disaster prone areas such as tsunami, landslide, earthquakes, floods and hurricanes that cause farmland is damaged, swallowing casualties also livestock animals. As far as research analysis in the implementation of APTERR in the years 2015 – 2019, tier I and tier II programs have not been utilized. APTERR still focuses on tier III, which is giving direct assistance to victims of natural disasters.*

**Keywords: ASEAN, APTERR, Rice Reserves, Food Security, Southeast Asia**

**ABSTRAK**

*Kawasan ASEAN merupakan penghasil beras utama di dunia. Bagi sebagian besar masyarakat di negara – negara anggota ASEAN beras juga menjadi komoditas pangan pokok. ASEAN merupakan kawasan kawasan yang rawan bencana seperti, tsunami, tanah longsor, gempa bumi, banjir dan angin topan yang menyebabkan lahan pertanian rusak, menelan korban jiwa juga hewan ternak. Penelitian ini memiliki rumusan masalah, bagaimana peran ASEAN Plus Three melalui program APTERR, bagaimana dinamika isu ketahanan pangan dan bagaimana implementasi komitmen APTERR sebagai upaya penanganan isu ketahanan pangan di Asia Tenggara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kerja sama ASEAN Plus Three melalui program APTERR. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa ASEAN merupakan ASEAN juga merupakan kawasan yang rawan bencana seperti, tsunami, tanah longsor, gempa bumi, banjir dan angin topan yang menyebabkan lahan pertanian rusak, menelan korban jiwa juga hewan ternak. Sejauh analisis penelitian dalam implementasi APTERR pada tahun 2015 – 2019, program tier I dan tier II belum dimanfaatkan. APTERR masih berfokus pada tier III, yaitu pemberian bantuan langsung pada korban bencana alam.*

**Kata Kunci: ASEAN, APTERR, Cadangan Beras, Ketahanan Pangan, Asia Tenggara**

---

<sup>1</sup> International Relations Department Faculty of Social and Political Sciences, Pasundan University

<sup>2</sup> International Relations Department Faculty of Social and Political Sciences, Pasundan University  
Bandung Email : [cindelaspra@gmail.com](mailto:cindelaspra@gmail.com)

## Pendahuluan

Dalam hal penyediaan pangan, Asia Tenggara merupakan kawasan penghasil pangan, khususnya beras. Beras menjadi komoditas utama masyarakat Asia, sebagian besar penduduknya mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok. Mengingat pertumbuhan jumlah penduduk dari setiap negara setiap tahunnya, maka peningkatan teknologi di bidang pertanian terus dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas serta produksi beras setiap tahunnya. Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan di Asia memiliki daratan yang hampir semua ditanami oleh padi.

Tercatat pada tahun 2018 Vietnam berhasil memproduksi 29.069.000 ton. Sedangkan Thailand mampu memproduksi sekitar 20.700.000 ton, jika dibandingkan dengan tingkat konsumsi masyarakatnya sekitar 10.500.000 yang disebabkan oleh populasi penduduk Thailand tidak sebanyak Indonesia, Thailand mampu melakukan ekspor ke beberapa negara di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Menurut data dari BPS, tahun 2019 produksi beras di Indonesia mencapai 26,91 juta ton. Meskipun Indonesia berada di urutan ketiga penghasil beras terbesar di dunia, namun Indonesia kerap melakukan impor beras guna memenuhi stok cadangan beras nasional karena permintaan yang terus meningkat pula. (Ari, 2019)

Menurut data badan cuaca Weather Underground, pada tahun 2015 Thailand, Laos, Singapura dan Kamboja, mengalami panas tertinggi yang mencapai 44,6 derajat Celcius. Thailand merupakan salah satu penghasil beras terbesar dunia, memprediksi hasil buruk pertanian akibat cuaca panas dan curah hujan yang minim tahun lalu. Jika Vietnam dan Thailand gagal panen, maka berdampak pada negara-negara

importir beras seperti Filipina dan Indonesia yang akan berujung pada peningkatan harga pangan. Menurut para ahli, kekeringan tahun 2016 di Asia Tenggara adalah yang terparah dalam puluhan tahun terakhir. (Armandhanu, 2016).

Pada tanggal 4 Oktober 1979 para pemimpin ASEAN menyepakati *Agreement on the ASEAN Food Security Reserve* yang mengatur skema kerja sama melalui pembentukan *ASEAN Emergency Rice Reserve/ AERR* yaitu penetapan jumlah total bahan pangan dasar, khususnya beras yang dimiliki masing – masing negara anggota dalam kebijakan nasionalnya, jumlah komitmen beras yang dicadangkan masing – masing negara dalam situasi krisis. Menurut data produksi dan perdagangan beras di Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara sebagai produsen beras terbesar juga negara pengimpor beras terbesar di Asia Tenggara. Kemudian, Thailand sebagai negara eksportir beras terbesar di Asia Tenggara juga sebagai negara pengimpor beras dengan volume yang besar yaitu peringkat empat negara importir beras di Asia Tenggara. Kondisi tersebut menyebabkan Asia Tenggara beranggapan bahwa pentingnya upaya untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan beras di kawasan. (Ekonomi, JI, & No, 2014)

Masalah pangan adalah kunci pertama keberlanjutan suatu bangsa, untuk menjaga kedaulatan pangannya suatu negara memiliki pendekatan masing-masing dalam menyikapi isu tersebut. Pangan merupakan kebutuhan hidup dasar yang harus dipenuhi untuk bisa bertahan hidup. Ketika seluruh masyarakat, kapanpun, dapat mengakses baik secara ekonomi dan fisik atas pangan yang sehat dan bernutrisi untuk memenuhi dan pilihan untuk kehidupan yang sehat dan aktif maka ketahanan pangan sudah berhasil tercapai. Pangan merupakan posisi yang sangat strategis bagi masyarakat. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan

yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri ataupun perdagangan bebas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, negara yang melakukan impor bisa saja melakukan ekspor dengan kualitas yang berbeda.

Dari berbagai fenomena yang terjadi, tampaknya krisis pangan sudah menjadi isu global yang dihadapi oleh sebagian besar negara – negara di dunia, yang membutuhkan perhatian dari semua pihak demi keberlangsungan kehidupan suatu bangsa. Krisis pangan yang dihadapi dunia amat rentan bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan penanganan serius oleh semua aktor dalam dunia internasional. Masalah ketahanan pangan saat ini bukan hanya isu ekonomi semata namun dapat bermakna politik.. Negara anggota ASEAN sangat memerlukan cadangan beras untuk memenuhi kebutuhan pangan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional dan dilatarbelakangi oleh krisis pangan global pada tahun 2007 – 2008 yang ditandai dengan meningkatnya harga bahan pangan dianggap sebagai ancaman serius bagi kawasan Asia Tenggara, KTT ASEAN ke-14 mengadopsi kerangka ASEAN *Integrated Food and Security (AIFS)* yang didukung oleh *Strategic Plan of Action on Food Security* sebagai ruang dan pendekatan kerja sama negara – negara anggota ASEAN dalam menjamin keamanan jangka panjang di kawasan ASEAN.

Dalam hal ini, ASEAN telah membentuk perjanjian dengan negara-negara mitra (Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, dan Korea) diluar kawasan yakni APTERR berfungsi sebagai bantuan cadangan beras darurat dan diharapkan dapat menangani isu ketahanan pangan dan meminimalisir angka kelangkaan pangan utama, yaitu beras. Lebih lanjut, penelitian ini akan berfokus

pada bagaimana APTERR sebagai salah satu instrumen dalam penanganan isu ketahanan pangan di kawasan Asia Tenggara.

### **Tinjauan Pustaka**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa konsep sebagai payung untuk menjelaskan bagaimana implementasi program Peran ASEAN *Plus Three* Melalui Komitmen ASEAN *Plus Three Emergency Rice Reserve* Dalam Menangani Isu Ketahanan Pangan di Asia Tenggara.

### **Pembahasan**

#### **Analisis Dinamika Isu Ketahanan Pangan di Asia Tenggara pada Tahun 2015 -2019**

Kawasan ASEAN merupakan penghasil beras utama di dunia. Bagi sebagian besar masyarakat di negara – negara anggota ASEAN beras juga menjadi komoditas pangan pokok. Ini bisa dijadikan opsi untuk Pemerintah Indonesia untuk mendorong efisiensi pengelolaan perberasan dalam negeri. serentak negara – negara anggota ASEAN memberlakukan kebijakan swasembada pangan. Paradigma pada masa MEA dituntut untuk menjadi mandiri pangan (*food self – reliance*) yaitu lebih membuka diri pada negara lain. Di era globalisasi ini, negara semakin tergantung atau setidaknya berkaitan dengan negara lain. Begitu pula dalam hal penyediaan pangan.

ASEAN merupakan kawasan yang berhasil menurunkan angka kemiskinan dengan perkembangan ekonominya, namun ASEAN juga merupakan kawasan yang rawan bencana (Sawada & Zen, 2014) seperti, tsunami, tanah longsor, gempa bumi, banjir dan angin topan yang menyebabkan lahan pertanian rusak, menelan korban jiwa juga hewan ternak.

Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi pangan domestik yang besar sehingga seharusnya penyediaan sebagian besar didominasi oleh dalam negeri.

Letak geografis kawasan Asia Tenggara beriklim tropis, sehingga mengantarkan pada hamparan tanah yang ditumbuhi tanaman. Padi misalnya, beras menjadi komoditas utama bagi negara – negara kawasan Asia Tenggara. Pasalnya, mayoritas warga negara di kawasan Asia Tenggara menjadikan beras sebagai makanan pokok. Maka, Asia Tenggara menjadi produsen terbesar, sekaligus konsumen terbesar pula. Negara-negara anggota ASEAN melakukan kerja sama dengan Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, dan Korea pada tahun 2012 secara resmi membentuk APTERR sebagai lembaga permanen pengelola cadangan beras untuk keperluan darurat bagi negara-negara anggotanya.

Pada aspek ketersediaan pangan tahun 2015, posisi Indonesia berada di atas Philipina (peringkat 63 dengan score 55,6), Thailand (peringkat 65 dengan score 54,7), Vietnam (peringkat 72 dengan score 53,9) dan Myanmar (peringkat 78 dengan score 51,4). (tribunnews, 2018). Gempa Aceh pada bulan Desember tahun 2016 menyebabkan 18.752 rumah rusak di Kabupaten Pidie Jaya, Pidie, Bireuen. Kemudian, 85.256 orang terlantar dan 104 tewas. Pemerintah Indonesia memberikan dukungan terkait kepada para korban, dukungan lebih lanjut berasal dari Palang Merah Indonesia (PMI), Badan Kerja Sama International Jepang, serta LSM. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengklaim bahwa Indonesia mengalami peningkatan ketahanan pangan dan mencatat lompatan tertinggi dalam indeks ketahanan pangan global (GFSI) 2016. Menteri menjelaskan bahwa pasokan makanan yang stabil

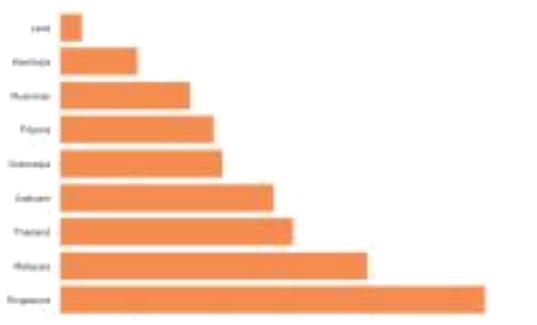
datang dari peningkatan produksi beras selama dua tahun terakhir oleh 8.300.000 ton akuntansi untuk 38.500.000.000.000 Rupiah (2.900.000.000 USD) bersama tanpa rekomendasi impor beras Premium di 2016. (APTERR, WEEKLY UPDATE ON ASEAN PLUS THREE FOOD SECURITY RELATED INFORMATION, 2016)

Sementara di Filipina, *Department of Social Welfare and Development* (DSWD) telah memperkuat koordinasi dengan kantor lapangan dan instansi terkait sebagai Typhoon NOCK-Ten telah masuk ke dalam negeri. Saat ini, DSWD strategis mempertahankan 573.730 paket makanan keluarga Preposisi di seluruh negeri serta dana siaga yang bernilai 127.010.000 peso (2.540.000 USD) untuk penyaluran ke unit yang berpotensi terkena. DSWD juga memperbarui situasi banjir karena curah hujan yang deras di wilayah 8 Visayas Timur. Ada 33.161 keluarga yang terkena dampak atau 141.929 orang yang terkena dampak di 240 desa. Beberapa pengungsi sudah kembali ke rumah karena cuaca yang lebih baik. DSWD mengirimkan item bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak di Samar Timur dan Utara. Otoritas Pangan Nasional / *The National Food Authority* di Samar meyakinkan beras yang cukup untuk memenuhi persyaratan unit pemerintah daerah / *Local Government Units* (LGUs) dan lembaga bantuan untuk distribusi kepada korban banjir. Ribuan orang terkena dampak di Samar Timur dan Utara. Kantor NFA setempat merilis 1.375 karung beras ke LGU sedangkan DSWD juga menandakan niat untuk membeli 2.000 karung untuk didistribusikan kepada keluarga pengungsi. Inventarisasi beras untuk NFA di Wilayah 8 mencapai 510.509 kantong sementara jumlah nasional mencapai 12,05 juta kantong per 12 Desember

2016. (APTERR, WEEKLY UPDATE ON ASEAN PLUS THREE FOOD SECURITY RELATED INFORMATION, 2016).

Bencana alam membutuhkan di Provinsi Ca Mau, Vietnam, menelan biaya 1,43 triliun dong atau (63 juta USD) pada 2016. Kekeringan dan intrusi air asin menyumbang 99 persen. Ada 53.000 hektar sawah yang rusak, 340 rusak rumah dan kekurangan air di 12.000 rumah tangga. Kehilangan beras dalam hal ini provinsi dinyatakan pada level 1 (risiko rendah). Total kompensasi 86 miliar dong (3,80 juta USD) diberikan kepada rumah tangga. Kemudian, 8 miliar dong (351.700 USD) digunakan untuk memperbaiki jalan dan peningkatan pasokan dan penyimpanan air.

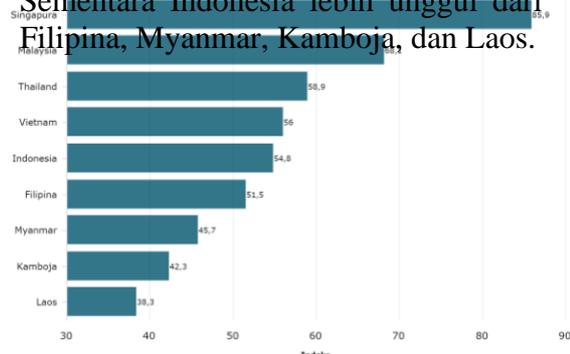
(APTERR, WEEKLY UPDATE ON ASEAN PLUS THREE FOOD SECURITY RELATED INFORMATION, 2016)



Gambar 4 1 Indeks Ketahanan Pangan ASEAN 2016 (The Economist Intelligence Unit, 2016)

Berdasarkan *Global Food Security Index (GFSI)*, pada tahun 2016 Indonesia berada di peringkat 71 dari 113 negara. Pada tahun 2015 mengalami peningkatan nilai indeks dari 47,9 menjadi 50,6 pada tahun 2016. Kemudian, *The Economist Intelligence Unit* dalam laporan *GFSI* menyatakan Indonesia mengalami peningkatan indeks ketahanan pangan terjadi karena didukung oleh tiga aspek utama yakni keterjangkauan, ketersediaan, serta kualitas dan keamanan. Singapura

menjadi satu - satunya di ASEAN dengan nilai indeks paling tinggi. Sementara Indonesia lebih unggul dari Filipina, Myanmar, Kamboja, dan Laos.



Gambar 4 2 Indeks Ketahanan Pangan ASEAN 2018 (The Economist intelligence Unit, 2018)

Pada tahun 2018, skor ketahanan pangan Singapura, Thailand, dan Malaysia bahkan Vietnam berada di atas ketahanan pangan nasional Indonesia. Tahun 2018 ketahanan pangan global (*Global Food Security Index/ GFSI*) 2018 meningkat sebesar 1,6 poin ke level 54,8. Indonesia tetap berada pada urutan ke – 5 dari sembilan negara di kawasan Asia Tenggara. Kemudian Singapura berada paling atas memimpin ketahanan indeks ASEAN dengan skor 85,9.

Hampir 2.000 orang berada di pusat pengungsian sementara karena banjir melanda negara Malaysia. Hujan muson rusak 80 hektar sawah dan juga mempengaruhi 1.954 orang di lima negara yaitu Johor, negeri sembilan, Selangor, perak dan Penang. Petani padi di Kampung matang Merbau, bagan serai, perak telah mengalami kerugian dan membutuhkan bantuan dari pemerintah. Selangor adalah daerah yang paling terpukul dengan Total 826 orang mengungsi. Namun, tidak ada kematian atau cedera

dilaporkan. (APTERR, WEEKLY UPDATE ON ASEAN PLUS THREE FOOD SECURITY RELATED INFORMATION, 2019).

Berdasarkan laporan *The Economist Intelligence Unit* tahun 2019 ketahanan pangan Singapura paling tinggi di dunia dengan indeks ketahanan pangan 87,4 poin. Thailand menjadi negara ASEAN dengan pertumbuhan tertinggi *Global Food Security Index* 2019 juga mencatat negara Gajah Putih itu naik 1,9 poin di posisi 54. Kemudian, Tahun ini mengantongi 65,1 poin yang bertengger di peringkat 52. Kemudian indeks ketahanan pangan Indonesia meningkat 0,6 poin dari tahun sebelumnya. Sehingga pada 2019 menempati posisi 62 dengan total 62,6 poin. Selain itu, Indonesia berada di peringkat lima dari sembilan negara di ASEAN.

#### **Upaya ASEAN Plus Three melalui ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve**

ASEAN *Plus Three Emergency Rice Reserve* (APTERR) merupakan skema kerja sama regional yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi kemiskinan di Negara-negara Anggota ASEAN, Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, dan Republik Korea. Beras yang dicadangkan di bawah ASEAN *Plus Three Emergency Rice Reserve* (APTERR) harus sesuai untuk konsumsi manusia berdasarkan standar keamanan pangan internasional. ASEAN *Plus Three Emergency Rice Reserves* (APTERR) memiliki standar kondisi untuk memberikan bantuan cadangan beras kepada negara – negara anggota, dewan ASEAN *Plus Three Emergency Rice Reserves* (APTERR) akan meloloskan dalam keadaan darurat. Keadaan darurat yang didefinisikan adalah sebagai: **“Negara atau kondisi di mana negara anggota ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserves (APTERR), karena musibah yang ekstrim dan tak terduga, tidak dapat mengatasi keadaan atau kondisi melalui cadangan nasionalnya dan tidak dapat memperoleh**

**pasokan beras yang dibutuhkan melalui perdagangan normal.”**

#### **Analisis Implementasi ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserves (APTERR) di kawasan Asia Tenggara**

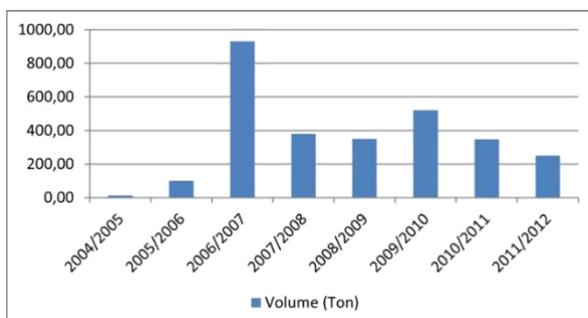
Asia Tenggara merupakan salah satu daerah yang rentan terhadap bencana alam, seperti banjir, angin topan, letusan gunung merapi, gempa, tsunami, angin putih beliung bahkan badai. Kondisi ini berdampak langsung kepada kerugian global yang terjadi. Bencana ini berdampak negatif dalam berbagai aspek, seperti pada mata pencaharian, pendidikan, kesehatan dan peluang ekonomi. Diperkirakan sektor pertanian menyerap sekitar 22% dari kerusakan akibat bencana alam. (Matthews, 2018). Membangun ketahanan bencana adalah hal penting untuk mengantisipasi krisis pangan terjadi akibat bencana alam.

Dari semua bencana alam, banjir yang paling umum di kedua negara maju dan berkembang. Asia Tenggara sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim karena populasinya yang berkembang pesat, sebagian besar hidup dalam kemiskinan, serta ketahanan pangan yang buruk dan berkurangnya sumber daya alam. Sumber daya yang terbatas dalam negara berpenghasilan rendah membuat sulit untuk mempersiapkan banjir, Banyak negara berpenghasilan rendah di Asia Tenggara berada pada risiko yang lebih besar dari kesehatan yang buruk karena sejumlah besar orang hidup di daerah yang penuh sesak. (Torti, 2012)

Selama proyek EARR periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 tentang pengelolaan cadangan beras, telah dilakukan beberapa kali pemanfaatan cadangan beras untuk berbagai macam kebutuhan penanganan keadaan darurat. Beberapa negara anggota diantaranya, telah memanfaatkan cadangan beras EARR.

1. Lao PDR pada periode tahun 2004/ 2005 dan 2010/2011
2. Indonesia pada periode tahun 2005/ 2006, 2008/2009 dan 2011/2012
3. Filipina pada periode tahun 2006/2007 dan 2009/2010
4. Kamboja pada periode tahun 2007/2008
5. Myanmar pada periode tahun 2008/ 2009
6. Thailand pada periode tahun 2011/2012

Pada umumnya pemanfaatan cadangan beras adalah untuk penanganan korban bencana, banjir, letusan gunung berapi, angin topan, pengentasan kemiskinan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi. Pada umumnya pemanfaatan cadangan beras adalah untuk penanganan korban bencana, banjir, letusan gunung berapi, angin topan, pengentasan kemiskinan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi. Secara statistik yang tertera pada Gambar 4.6 pada periode tahun 2006/2007 volume pemanfaatan beras cadangan mencapai titik terbesar. Terkait dengan bantuan beras untuk korban angin topan di Filipina dan korban letusan gunung berapi. Bantuan cadangan beras ini disampaikan kepada sekitar 154.500 rumah tangga.



Melalui APTERR, kawasan ASEAN dapat memperkuat upaya untuk menstabilkan penyediaan pangan dalam

bantuan cadangan beras pada keadaan darurat atau krisis pangan kawasan ASEAN. Sidik menyebutkan melalui EARR, Indonesia dapat memanfaatkan sebagai salah satu cara untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP), sebagai outlet untuk negara lain stok beras ketika mengalami surplus, dan mendapatkan bantuan beras atau *rice relief* ketika terjadi keadaan darurat. (Sidik, 2008). Tahun 2016 ketika Kabupaten Sampang, Madura, Indonesia mengalami banjir EARR memberikan bantuan cadangan beras sejumlah 20 ton, kemudian 80 ton beras untuk bantuan rehabilitasi daerah yang terlanda banjir di Kabupaten Jember.

Pada periode Oktober – Desember 2012, APTERR mendistribusikan beras sejumlah 200 ton untuk penanganan kerawanan pangan dan pengentasan kemiskinan. Bantuan ini menjangkau sekitar 20.000 rumah tangga di Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Banten. (APTERR, APTERR Mechanism., 2013)

APTERR bukanlah cadangan beras darurat pertama yang dibentuk oleh ASEAN yang didirikan oleh negara anggota ASEAN. *The ASEAN Emergency Rice Reserve* (AERR) diluncurkan pada tahun 1979 sebagai pengakuan atas perlunya solusi regional untuk kerawanan pangan. Negara anggota secara sukarela menyumbangkan saham ke stockpile regional. Namun, setelah 25 tahun beroperasi, AERR berkomitmen hanya 87.000 ton-hanya setengah hari pasokan untuk seluruh ASEAN. Rencana untuk menghidupkan kembali AERR dan memperluas keanggotaan untuk tiga negara Plus pertama muncul di 2001. Sebuah tim yang didukung oleh Jepang mengusulkan dan kemudian menerapkan proyek percontohan tiga

tahun – *East Asia Emergency Rice Reserve* (EAERR).

Sejauh analisis penelitian dalam implementasi APTERR pada tahun 2015 – 2019, program *tier* I dan *tier* II belum dimanfaatkan secara maksimal. APTERR masih berfokus pada *tier* III. Program *tier III* berfokus pada bantuan cadangan beras untuk keadaan darurat akut seperti, bencana alam untuk menghindari kerawanan pangan. Pelepasan cadangan beras di bawah *tier* III adalah sumbangan beras sebagai bantuan kemanusiaan kepada negara penerima yang terkena musibah atas permintaan mereka dalam menanggapi keadaan darurat akut. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh APTERR melalui website [www.apterr.org](http://www.apterr.org) implementasi *tier* III berjalan dengan baik. Sedangkan untuk program *Tier* I, berfokus pada pelepasan stok yang disisihkan berdasarkan skema yang telah diatur sebelumnya untuk mengatasi masalah ketersediaan makanan. Program ini dirancang untuk mengantisipasi keadaan darurat. Pelepasan cadangan beras yang diatur sebelumnya berdasarkan *tier* I diformalkan sebagai kontrak berjangka.

## Kesimpulan

Secara umum, APTERR mencerminkan pendekatan yang lazim untuk ketahanan pangan di ASEAN dan tujuannya untuk membangun kerja sama yang lebih besar yang menyatakan jumlah dan tingkat beras tertentu, metode penetapan harga, ketentuan pembayaran dan pengiriman, dan persyaratan lain antara negara pemasok dan negara penerima. Kemudian, *tier* II melibatkan pelepasan saham yang diperuntukkan bagi keadaan darurat yang tidak ditangani oleh *Tier* I. Program ini dirancang untuk keadaan darurat yang tidak terduga. Pelepasan cadangan beras menurut *Tier* II tersedia untuk

negara anggota ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserves (APTERR) untuk memenuhi kebutuhan darurat beras dalam pengaturan lain.

Dalam implementasi program *tier* I dan *tier* II pelaksanaan APTERR akan berhasil signifikan dengan usaha yang signifikan tetapi akan dapat dicapai dengan kemauan politik, dukungan keuangan dan pola pikir yang diarahkan beradaptasi dengan situasi keamanan pangan yang berkembang. Pada akhirnya, dampak dari APTERR mungkin tergantung pada seberapa efektif mampu melaksanakan pelajaran dari keberhasilan dan kekurangan cadangan beras darurat masa lalu di sektor beras secara bertahap. Oleh karena itu mekanisme yang berpotensi berguna dan dapat dilihat sebagai salah satu alat dalam pendekatan Multidimensional untuk mengatasi Pada saat yang sama, bagaimanapun, perlu sadar akan kebutuhan untuk beradaptasi dengan tantangan keamanan makanan muncul. Tampaknya hal ini sejalan dengan tujuan ketahanan pangan ASEAN ditambah tiga negara mitra. Dalam pernyataan dukungan untuk Perjanjian APTERR pada bulan November 2012 sebagai “mekanisme permanen untuk memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan terpadu di kawasan”,

Sejauh analisis penelitian dalam implementasi APTERR pada tahun 2015 – 2019, program *tier* I dan *tier* II belum dimanfaatkan secara maksimal. APTERR masih berfokus pada *tier* III, yaitu pemberian bantuan langsung pada korban bencana alam permasalahan di sektor beras. Maka penting bahwa ASEAN Plus Three terus mengambil pelajaran dari keberhasilan dan kekurangan cadangan darurat beras yang lalu untuk mewujudkan potensi penuh APTERR, dan memotivasi para anggota untuk membangun komitmen mereka

secara signifikan. Mengingat ASEAN merupakan ASEAN juga merupakan kawasan yang rawan bencana seperti, tsunami, tanah longsor, gempa bumi, banjir dan angin topan yang menyebabkan lahan pertanian rusak, menelan korban jiwa juga hewan ternak.

Program *tier* III berfokus pada bantuan cadangan beras untuk keadaan darurat akut seperti, bencana alam untuk menghindari kerawanan pangan. Pelepasan cadangan beras di bawah *tier* III adalah sumbangan beras sebagai bantuan kemanusiaan kepada negara penerima yang terkena musibah atas permintaan mereka dalam menanggapi keadaan darurat akut. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh APTERR melalui website [www.apterr.org](http://www.apterr.org) implementasi *tier* III berjalan dengan baik.

Sedangkan untuk program *Tier* I, berfokus pada pelepasan stok yang disisihkan berdasarkan skema yang telah diatur sebelumnya untuk mengatasi masalah ketersediaan makanan. Kemudian, *tier* II melibatkan pelepasan saham yang diperuntukkan bagi keadaan darurat yang tidak ditangani oleh *tier* I. Pelaksanaan APTERR akan berhasil signifikan dengan usaha yang signifikan tetapi akan dapat dicapai dengan kemauan politik, dukungan keuangan dan pola pikir yang diarahkan beradaptasi dengan situasi keamanan pangan yang berkembang. Pada akhirnya, dampak dari APTERR mungkin tergantung pada seberapa efektif mampu melaksanakan pelajaran dari keberhasilan dan kekurangan cadangan beras darurat masa lalu.

#### Daftar pustaka

##### BUKU :

- Sorensen, G. (2005). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*.  
Jackson, R. (2005). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*.

Kartasasmita, K. (1977). *Administrasi Internasional*.

Holsti, K. J. (1988). *Politik Internasional: Kerangka untuk Analisis* (2nd ed.). Jakarta: Erlangga.

Mardalis. (1999). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jourdan, M. (2014). *Mengkaji Neoliberalisme*. Kartasasmita, K. (1977). *Administrasi Internasional*.

Mas'ood, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES.

Mulyadi, L. (2010). *Relevansi Dan Implementasi Teori Grotius Tentang Pembentukan Perjanjian Internasional*.

##### JURNAL :

Briones, R. M. (2011). Regional Cooperation for Food Security: The Case of Emergency Rice Reserves in the ASEAN Plus Three. *Asian Development Bank Working Paper*, 18(18).

Dam, S. (1995). *Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan, dan Masa Depan*.

Ekonomi, P. S., Jl, K. P., & No, Y. (2014). *PERAN CADANGAN BERAS DARURAT DI KAWASAN ASIA TENGGARA Role of Emergency Rice Reserve in Southeast Asia Region*. (70), 73–85.

Hadi, A., Rusli, B., Pangan, K., & Buruk, G. (2019). *TERHADAP KETAHANAN PANGAN INDONESIA*. 2, 173–181.

Jackson, R. (2005). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*.

Briones, R. M. (2011). Regional Cooperation for Food Security: The Case of Emergency Rice

- Reserves in the ASEAN Plus Three. *Asian Development Bank Working Paper*, 18(18).
- Dam, S. (1995). *Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan, dan Masa Depan*.
- Ekonomi, P. S., Ji, K. P., & No, Y. (2014). *PERAN CADANGAN BERAS DARURAT DI KAWASAN ASIA TENGGARA Role of Emergency Rice Reserve in Southeast Asia Region*. (70), 73–85.
- Hadi, A., Rusli, B., Pangan, K., & Buruk, G. (2019). *TERHADAP KETAHANAN PANGAN INDONESIA*. 2, 173–181.
- Briones, R. M. (2011). Regional Cooperation for Food Security: The Case of Emergency Rice Reserves in the ASEAN Plus Three. *Asian Development Bank Working Paper*, 18(18).
- Dam, S. (1995). *Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan, dan Masa Depan*. Ekonomi, P. S., Ji, K. P., & No, Y. (2014). *PERAN CADANGAN BERAS DARURAT DI KAWASAN ASIA TENGGARA Role of Emergency Rice Reserve in Southeast Asia Region*. (70), 73–85.
- Hadi, A., Rusli, B., Pangan, K., & Buruk, G. (2019). *TERHADAP KETAHANAN PANGAN INDONESIA*. 2, 173–181.
- Discussion Paper Series*, 1–48. Retrieved from <http://www.eria.org/ERIA-DP-2014-03.pdf>
- Baldwin, D. A. (1993). Neoliberalism, Neorealism, and World Politics. *Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate*. [https://doi.org/10.1016/S0969-4765\(04\)00066-9](https://doi.org/10.1016/S0969-4765(04)00066-9)
- Keohane, R. O. (2005). After hegemony: Cooperation and discord in the world political economy. In *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. <https://doi.org/10.2307/40202461>
- Ritzer, G., & Guba, E. (1991). The Paradigm Dialog. *Canadian Journal of Sociology / Cahiers Canadiens de Sociologie*. <https://doi.org/10.2307/3340973>.
- Sawada, Y., & Zen, F. (2014). Disaster Management in ASEAN. *ERIA Discussion Paper Series*, 1–48. Retrieved from <http://www.eria.org/ERIA-DP-2014-03>

#### INTERNET :

- Hermanto, N. (2015). Ketahanan Pangan Indonesia di Kawasan ASEAN. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 33(1), 19. <https://doi.org/10.21082/fae.v33n1.2015.19-31>
- Kartasmita, K. (1977). *Administrasi Internasional*. Sawada, Y., & Zen, F. (2014). Disaster Management in ASEAN. *ERIA*